

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Anshari Ritonga, Tinjauan Hukum Pajak Sebagai Ilmu Khusus, Pustaka El Manar, Jakarta, 2017
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Baharuddin Lopa, 1987; Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan pertama, Bulan Bintang, Jakarta;
- Bambang Walujo, 2016; Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- , 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenasamedia Group, Jakarta;
- Chart, 2013; Permasalahan Teknis Dalam Penanganan Perkara Perpajakan, Jampidsus point 8, Untuk Perbuatan Yang Bersifat Sengaja Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Pasal 39 dan 39A, maka *Ultimun Remedium* Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Pasal 44B UU KUP.
- Choky Ramadhan, Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia, (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Darmawati, 2020; Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar;
- Febby Mutiara Nelson, Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2020).
- Friedman M. Lawrence, 1977; Legal Theory, Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin (1993), Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- F. Zimring dan R. Frase, 1980, The Criminal Justice System, Little Brown Company;

- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Hazel B. Karper, 1979, *Introduction to the Criminal Justice System*, Second Edition, West Publishing Company;
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta;
- Jan S, Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)
- John H, Langbein, 1979, *Understanding The Short History of Plea Bargaining*, Yale Law School: Faculty Scholarship;
- Joko Sriwondo, (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ketut Sumedana, 2020; *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan pertama, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Lani Dharmasetya, 2024, *Tindak Pidana Perpajakan*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara,
- Lili Rasyidi, Ira Rasyidi, 2001, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Lukman Hakim, Eka Dewi Sartika Saimima, Aggreany Haryani Putri, 2020, *Penerapan Konsep Plea Bargaining, Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta;
- Luhut M.P. Pagaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta;
- Marc Ancel, 1965; *Social Defence*, Routledge and Kagan Paul, London;
- Muhammad Djafar Saidi, 2022; *Pembaruan Hukum Pajak*, Edisi Terbaru, Cetakan keenam, PT RajaGrafindo Persada, Depok;
- , 2013; *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;

- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012; *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, Cetakan kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011; *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan, Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta;
- R. Santoso Brotodihardjo, 1995; *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan kedua, PT Eresco, Bandung;
- Rochmat Soemitro, 1988; *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan kedua, PT. Eresco, Bandung;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung;
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, Cetakan Kedua 2011).
- , 2016; *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Geen Straf Zonder Schuld*, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Robert R. Strang dalam Indrianto Seno Adji, 2011, *KUHAP Dalam Prospektif*, Diadit Media, Jakarta;
- Salman Luthan, 2014; *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta;
- Shart Dellyanan, 1988; *Konsep Penegakan Hukum*, Cetakan pertama, Liberty, Bandung;
- Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan, Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
- Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke-17, PT RajaGrafindo Persada, Depok;
- Satjipto Rahardjo, 2000; *Ilmu Hukum*, Cetakan pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung;

Sudarto, 1987; Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Cetakan pertama, Sinar Baru, Bandung;

-----, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung;

Suparno, 2012, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Pustaka Magister, Semarang;

Teguh Prasetyo, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung;

Y. Sri Pudyatmoko, 2015; Memahami Keadilan Di Bidang Pajak, Cetakan pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;

Widi Widodo, Dedy Djetriz, 2008; Tax Payr's Rights, Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak, Cetakan pertama, Alfabeta, Bandung;

Jurnal/ Artikel, Disertasi, Tesis, Skripsi

Abdul Basir, 2021, *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Pendapatan Negara*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, hlm. 143

Aby Maulana, 2015; Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada Jalur Khusus Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara, Jurna Cita Hukum, Volume 3 Nomor 2;

-----, "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara", Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 43

Albert W. Alschuler, "Plea Bargaining And Its History", Columbia Law Review, Vol. 79, No 1, 1979, hlm. 5

-----, "The Changing Plea Bargaining Debate," California Law Review, Vol. 69, No. 652, 1981, hlm. 652

Angela A Supit, 2016; Prapenuntutan Dalam KUHAP Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jurnal Hukum, Lex Crimen, Volume 5 Nomor 1;

- Albert W. Alschuler, 1979, Plea Bargaining And Its History, Columbia Law Review, Volume 79 Nomor 1;
- Choky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza dan Evandri G. Pantouw, "Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara", Jakarta, Jurnal Teropong, MaPPI FHUI, Vol. 3, 2015, hlm. 79.
- Edy Suranta, dkk. (2023). "Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi". Locus Journal of Academia Literature Review, Vol. 2, No. 2. Hlm. 184
- Esin Orucu, 2008, What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion, Electronic Journal of Comparative Law, Volume 12, Nomor 1;
- Harvard Law Review, 1970, The Unconstitutionality of Plea Bargaining, Volume 83;
- Ibrahim Idham, 1985; Masalah Penyidikan Dan Tindak Pidana Pajak, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 1 Nomor 3;
- John H. Langbein. Understanding The Short History of Plea Bargaining (Yale Law School: Faculty Scholarship, 1979), hlm. 3
- Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adianto Mau, "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9, no. 4 (2022), hlm. 1076
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan, 2011, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 6 Nomor 1;
- Nella Octaviany Siregar, 2019; Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Jurnal Wajah Hukum, Volume 3 Nomor 1;
- Nur Ainiyah Rahmawati, 2013; Hukum Pidana Indonesia ; Ultimum Remedium Atau Premium Remedium, Jurnal Hukum Recidive, Volume 2 Nomor 1;
- Pradnyana I.M.F., & Parsa I.W. (2021). "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi". Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 10 No. 2. hlm. 344-356

Rezky Abdi Fratama, *Jalur Khusus (Pleas Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana*, Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 2, September 2020, hlm. 237.

Rolando Ritonga, *Manifestasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi guna Mengubah Tatahan Sosial Masyarakat*, The Prosecutor Law Review, Vol. 1, No. 2, Agustus 2023, hlm. 28

Ruben Achmad, 2016, Jurnal: Aspek Hukum Pidana dalam tindak Pidana Perpajakan;

Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Le Renaisan* 6, no. 3 (Juli 2021), hlm. 484

Tri Wibowo, 2009, Efektivitas Sanksi Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9 Nomor 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan